

HK Segera Tuntaskan Perizinan Tol Trans-Sumatera

JAKARTA – PT Utama Karya (HK) segera menuntaskan perizinan pembangunan jalan tol Trans-Sumatera ke Kementerian Pekerjaan Umum. Hal itu menyusul kepastian pemerintah menunjuk perseroan untuk menggarap jalan bebas hambatan sepanjang 2.696 kilometer (km) tersebut.

Sekretaris Perusahaan Utama Karya Ari Widiatoro mengungkapkan, ada beberapa ruas tol Trans-Sumatera yang akan diajukan untuk diproses perizinannya. Namun yang diprioritaskan adalah tiga ruas tol yang memungkinkan dibangun terlebih dulu.

“Ketiga ruas tol itu adalah Bakaheuni-Lampung, Palembang-Indralaya, dan Medan-Binjai,” kata Ari saat dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Ari, ketiga ruas tol itu bisa dibangun karena proses pembebasan lahannya sudah cukup baik dengan rata-rata mendekati 90%. Namun, dia mengaku tidak hapal berapa lahan yang sudah bebas di tiga ruas tol tersebut. “Meski sudah cukup, kamijuga

harus minta izin baik ke PU dan lainnya,” imbuh dia.

Ari pernah menuturkan bahwa kebutuhan untuk membangun ketiga ruas tol itu sebesar Rp 8,3 triliun. Dana itu diharapkan dapat dipenuhi dari penyertaan modal negara dan sebagian kas internal.

Sedangkan Direktur Utama Utama Karya Tri Widjanto menambahkan, pihaknya telah berupaya mempercepat pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dengan melakukan survei potensi jalan tol, penyusunan desain dan trase sesuai standar operasional hingga membuat studi kelayakan. Itu dilakukan sambil menunggu aturan penunjukan langsung dan penyertaan modal negara diberikan oleh pemerintah.

“Begitu aturan itu sudah dikeluarkan, perusahaan tinggal meneruskan pengerjaan fisik jalan tol tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pemerintah menyatakan draf rancangan peraturan presiden (perpres) terkait penugasan pe-

ngerjaan proyek tol Trans-Sumatera kepada PT Utama Karya, diajukan ke Presiden pekan ini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan telah berhasil menyelesaikan seluruh draf perpres tersebut.

“Dari sisi kementerian, draf yang sudah disetujui tadi semua lengkap dan final. Kemudian, kami akan ajukan ke Presiden,” kata Hatta di kantornya, pekan lalu.

Dia berharap dengan penyelesaian draf rancangan perpres itu, maka pelaksanaan proyek infrastruktur di wilayah Sumatera tersebut dapat berjalan lebih cepat.

Hatta juga menjelaskan, sumber dana proyek ada dua macam, yakni dari penempatan modal negara (PMN) dan pembiayaan dari korporasi baik melalui pinjaman maupun penerbitan obligasi. (ean)